82

Sumbangan Pemikiran :

BAHAN DISKUSI DENGAN MENTERI TENTANG EKONOMI KEHUTANAN

Dudung Darusman
(Lab. Poleksos Kehutanan IPB)

Disampaikan kepada Prof Dr Yusuf Sudo Hadi, MAgr, Dekan Fakultas Kehutanan IPB, 28 Agustus 2000

Permasalahan mendasar dari sudut EKONOMI KEHUTANAN

1. Hutan alam yang semakin berkurang dan mengalami kerusakan akibat salah pengelolaan.
2. *Over-capacity* industri perkayuan, dari sudut ketersediaan bahan baku secara lestari.
3. Sangat lambannya pembangunan HTI sebagai sumber bahan baku selain hutan alam.
4. Sangat sedikitnya jumlah pelaku ekonomi kehutanan, terjadi konglomerasi yang sangat ekstrim (*very uncompetitive economy*), dan terbukti sangat rapuh (*very unhealthy*).
5. Distribusi ekonomi kehutanan yang sangat timpang antara Pusat dan Daerah, serta antar daerah (propinsi dan kabupaten).
6. KKN yang menyebar luas dan berlapis.

Arah kebijaksanaan EKONOMI KEHUTANAN

1. Pengurangan secara bertahap (tapi segera) tekanan produksi kayu dari hutan alam.
2. Pengendalian kapasitas industri perkayuan (pengurangan kapasitas industri primer dan mengalihkannya ke industri sekunder/hilir).
3. Mempercepat pembangunan HTI.
4. Memberi kesempatan usaha kepada pelaku-pelaku ekonomi baru yang lebih luas dengan skala yang bervariasi dari yang sedang sampai yang kecil, sementara pelaku yang besar diminta segera kembali aktif berusaha dengan pola pengelolaan yang baik.
5. Mengatur segera pelimpahan otonomi di bidang kehutanan ke Daerah.
6. Pembinaan SDM dan pengawasan.

Secara ekonomi untuk mencapai arahan kebijaksanaan tersebut dapat digunakan kombinasi instrumen ekonomi, yang meliputi : *tarif, non-tarif, fiscal-moneter, dan* *penelitian dan pengembangan (R & D)*. Sebagaimana dalam dunia usaha pada umumnya, ekonomi kehutanan juga sangat dipengaruhi oleh kepastian-kepastian iklim usaha.

Fakultas Kehutanan IPB telah lama memikirkan pilihan-pilihan instrumen apa yang paling baik untuk masing-masing dan keseluruhan pencapaian arah kebijaksanaan tersebut.